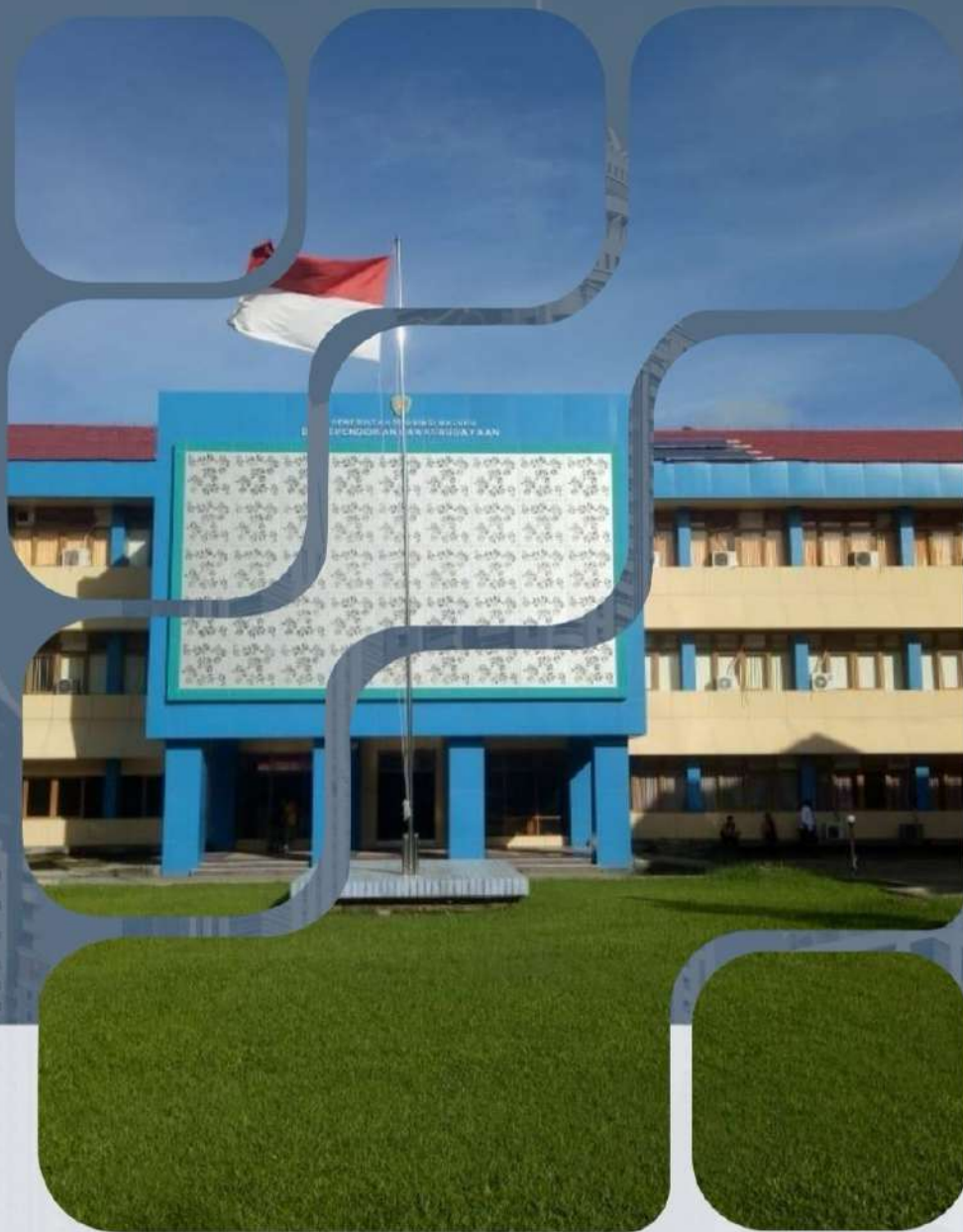




PROVINSI MALUKU



LKIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU*



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124

Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377

Laman: www.malukuprov.go.id Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 09 Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH


Drs. JASMONO, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19741226 199412 1 003

Executive Summary

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2025 merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai sesuai Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan mandat yang di amanatkan dalam PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (LKIP) Tahun 2025 disusun untuk menjawab PK Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RPD transisi 2025-2026.

Secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan ini didasarkan pada penjabaran Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang terangkum di dalam visi menengah Provinsi Maluku adalah ***“Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas Gugusan Kepulauan”***. Untuk mewujudkan Visi dilaksanakan dalam 3 (tiga) misi Jangka Menengah Provinsi Maluku yang terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

No.	Misi
M1	Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
M2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
M5	Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku, Selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan masing – masing bidang yang melahirkan 3 (*Tiga*) sasaran strategis sesuai Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, yaitu:

Kode	Sasaran Strategis
SS1	Revitaliasi Pendidikan Vokasi
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
SS6	Pemerataan Akses Pendidikan
SS8	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas layanan Pendidikan

Berdasarkan sasaran strategis diatas selanjutnya dijabarkan kedalam 8 (*Delapan*) program pada tahun 2025, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6. Program Pembinaan Sejarah
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8. Program Pengelolaan Permuseuman

Selanjutnya program – program tersebut di atas selama tahun 2025 diimplementasikan dengan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni sebesar **Rp.1.158.714.383.429,-** yang tertuang dalam **8** Program, **19** Kegiatan dan **73** Sub-Kegiatan serta anggaran Perubahan sebesar **Rp.1.153.817.718.222,-** yang tertuang dalam **8** Program, **19** Kegiatan dan **83** Sub Kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dirincikan sebagai berikut :

No	NAMA PROGRAM (PERUBAHAN)	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8	26
2	Program Pengelolaan Pendidikan	3	44
3	Program Pendidik dan Tenaga kependidikan	1	1
4	Program Pengembangan Kebudayaan	2	2
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	3
6	Program Pembinaan Sejarah	1	1
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2	5
8	Program Pengelolaan Permuseuman	1	1
Total		19	83

Daftar Isi

<i>Executive Summary</i>	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
1.3. SUSUNAN ORGANISASI	7
1.4. SUMBER DAYA	8
a. Sumber daya Manusia.....	8
b. Aset tetap.....	9
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.6. ISU STRATEGIS	10
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. RENCANA STRATEGIS	14
a. Visi.....	15
b. Misi	16
c. Tujuan	16
d. Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan renstra	17
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	25
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
3.2. REALISASI ANGGARAN	46
BAB. IV. PENUTUP.....	52
4.1. TINJAUAN UMUM	52
4.2. TINJAUAN KHUSUS	52
4.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT	54
LAMPIRAN	55

Daftar Tabel

Tabel. 1.	Data Pegawai berdasarkan Gol. Ruang	9
Tabel. 2.	Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel. 3.	Data Pegawai berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin	9
Tabel. 4.	Data Nilai Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per 31 Desember 2025	9
Tabel. 5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025	18
Table. 6.	Sasaran Strategis (SS1) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Tujuan Strategis	21
Tabel. 7.	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025	23
Tabel. 8.	Gradasi Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel. 9.	Capaian Sasaran Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan	25
Tabel. 10.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2024 dan Tahun 2025	25
Tabel. 11.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir Periode Renstra.....	26
Tabel. 12.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Provinsi Maluku Tahun 2025.....	28
Tabel.13.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan.....	29
Tabel. 14.	Capaian Sasaran Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	30
Tabel. 15.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025	31
Tabel. 16.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir periode RENSTRA.....	31
Tabel. 17.	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2025 Provinsi Maluku.....	34
Tabel. 18.	Tingkat Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	35
Tabel. 19.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatkan akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata.....	37
Tabel. 20.	Capaian Sasaran Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.....	40
Tabel. 21.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	41
Tabel. 22.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir periode RENSTRA.....	41

Tabel. 23.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam Masyarakat.....	44
Tabel. 24.	Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	45
Tabel. 25.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025	45
Tabel. 26.	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir periode RENSTRA.....	46
Tabel. 27.	Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik ..	48
Tabel. 28.	Capaian Penilaian Kinerja Tahun 2025.....	53

Daftar Gambar

Gambar. 1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	8
Gambar. 3.1. Perbandingan Realisasi Dimensi Tahun 2024 dan 2025	42

Pendahuluan

Bab I

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku, tantangan yang sementara dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Maluku, agar dapat meningkatkan proporsi penduduk yang berpendidikan lebih tinggi atau peningkatan sumber daya manusia serta masyarakat yang berbudaya. Kondisi ini antara lain terlihat dari, masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur. profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata, Terbatasnya aparatur yang berpengalaman. Hal ini pada akhirnya berakibat pada mutu pelayanan pendidikan dan kebudayaan kita yang masih belum optimal, dan akibat dari mutu pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang rendah berdampak pada kualitas Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta peserta didik dan para pelaku budaya. Terbatasnya data dan informasi pendidikan dan kebudayaan juga. juga masih terlihat dari adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat di perkotaan dan pedesaan, antara penduduk miskin dan penduduk yang sudah mampu. Pendidikan kejuruan yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat, juga belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam mengembangkan layanan Pendidikan dan kebudayaan dalam konteks merespon permasalahan pelayanan juga berangkat dari dua paradigma dasar yaitu :

1. Paradigma Pendidikan Untuk Perkembangan, Pengembangan dan Atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

PuP3B yang merupakan terjemahan dari *Education for Sustainable Development* (EfSD) merupakan paradigma pendidikan baru yang diprakarsai oleh PBB melalui UNESCO dengan tujuan agar pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional).

Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan Planet Bumi, dan bahkan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Paradigma ini pun menghendaki keberlanjutan kesehatan lingkungan dengan cara menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, melestarikan komponen-komponen dalam ekosistem, dan menjaga keseimbangan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Selain itu, setiap bentuk intervensi manusia atas keseimbangan ekosistem baik itu melalui upaya-upaya pengembangan yang dosis intervensinya rendah sampai dengan pembangunan yang dosis intervensinya tinggi harus dilakukan dalam batas daya dukung lingkungan, tidak mengancam keberlanjutan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan menghemat penggunaan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui.

PuP3B juga menghendaki keberlanjutan keseimbangan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sebagai bagian integral dari ekosistem. Dengan kata lain, PuP3B menghendaki

manusia yang melestarikan keberlanjutan peradabannya tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistemnya. PuP3B hanya akan terwujud apabila paradigma pembelajaran sepanjang hayat yang berpusat pada peserta didik, yang mengidamkan subyek pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan, betul-betul dilaksanakan. Tanpa adanya manusia pembelajar yang seperti itu, sulit sekali PuP3B bisa terwujud. PuP3B juga menghendaki bahwa pendidikan untuk semua yang inklusif dan tanpa diskriminasi betul-betul dilaksanakan, karena adanya sebagian masyarakat yang tidak menjadi pembelajar sepanjang hayat akan menjadi sumber ketidakberlanjutan keseimbangan ekosistem.

Dalam perspektif PuP3B, pendidikan bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi solusi. Pendidikan menjadi masalah jika pendidikan tidak mengadopsi paradigma PuP3B, sehingga menghasilkan manusia yang tidak peduli akan keberlanjutan keberadaan dirinya, komunitas masyarakatnya, sistem sosialnya, sistem ekonominya, kebudayaanya, dan lingkungan alamnya. Namun pendidikan bisa menjadi solusi jika pendidikan yang dilakukan dapat membangun kesadaran kritis tentang PuP3B. Selama ini ada paradoks. Semakin orang terdidik, semakin menjadi masalah, karena tingkat konsumsinya cenderung meningkat dan dilakukan dengan cara-cara yang boros sumberdaya dan merusak lingkungan.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Apapun yang dilakukan manusia terhadap ekosistem pasti akan ada akibatnya. Pada akhirnya muncul kesadaran bahwa bumi merupakan satu sistem yang “tertutup”. Ketika sumberdaya alam habis, maka sumberdaya alam itu tidak akan bisa diperoleh dari

planet lain. Substansi lain yang harus ada dalam PuP3B adalah pandangan dan kepercayaan terhadap masa depan dan berpikir holistik dengan visi jangka panjang.

Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial. Bumi adalah habitat semua manusia, karena itu nilai keadilan, tanggung-jawab sosial, dan demokrasi harus dikembangkan. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan termasuk pembangunan. Ada dua aspek pembelajaran dalam PuP3B. Aspek pertama adalah pembelajaran individual, yang menyangkut wawasan, nilai-nilai, dan kemampuan individual. Aspek kedua adalah pembelajaran sosial, yang menyangkut pengembangan modal sosial dan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran akan menumbuhkan kemampuan kerjasama pada berbagai skala ekosistem, sehingga bisa melakukan adaptasi berlanjut pada skala ekosistem.

2. Paradigma Pendidikan membangun kebudayaan

Pendidikan mengandung aspek dalam proses membangun sebuah peradaban kebudayaan, baik secara jasmaniah dan rohaniah. Proses budaya tentunya tidak lepas dari proses pembelajaran akan sebuah kearifan lokal daerah yang melekat kuat pada suatu daerah. Pembangunan pendidikan dalam mendongkrak nilai kearifan yang beredar dalam suatu daerah membutuhkan penanganan yang komprehensif dan sebagai langkah revitalisasi dalam menjaga multikultural keberagaman budaya. Untuk itu pembangunan jasmaniah dan rohaniah perlu untuk dijadikan pedoman dengan dasar pendidikan yang kuat. Pola pembangunan jasmaniah budaya harus bersinergi dengan pembangunan rohaniah budaya. Kedua hal ini penting untuk dikembangkan

dengan dasar pondasi pengembangan nilai-nilai kearifan lokal melalui dunia pendidikan.

Makna pembelajaran melalui pendidikan juga harus menanamkan karakter pembelajaran mengenai pengelolaan aset budaya yang meliputi pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah secara jasmaniah dengan tujuan meningkatnya perlindungan/pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan dengan mengacu pada budaya daerah. Penjelasan lain mengenai peran dunia pendidikan dalam usaha menunjang pembangunan rohaniyah budaya adalah melalui penanaman karakter berbasis budaya dan nilai-nilai sejarah agar setiap individu diharapkan menjadi diri yang berbudaya dan mampu mengimplementasikan karakter berbudaya demikian dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu perlu di lakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah di laksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selama tahun 2025. Instrumen pengevaluasinya melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP disusun dalam rangka menciptakan aksesibilitas, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 dan Renstra Transisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 dimana bidang Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan pada terselenggaranya pelayanan pendidikan dan Kebudayaan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Maluku.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai derivasi dari RPJMD dan RENSTRA maka Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku disusun untuk tetap menjaga sinergitas antara rencana target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di atur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku sebagai dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun kedudukan, Tugas Pokok, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Bidang kebudayaan;
4. Pembinaan teknis di bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan;
5. Pembinaan cabang Dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

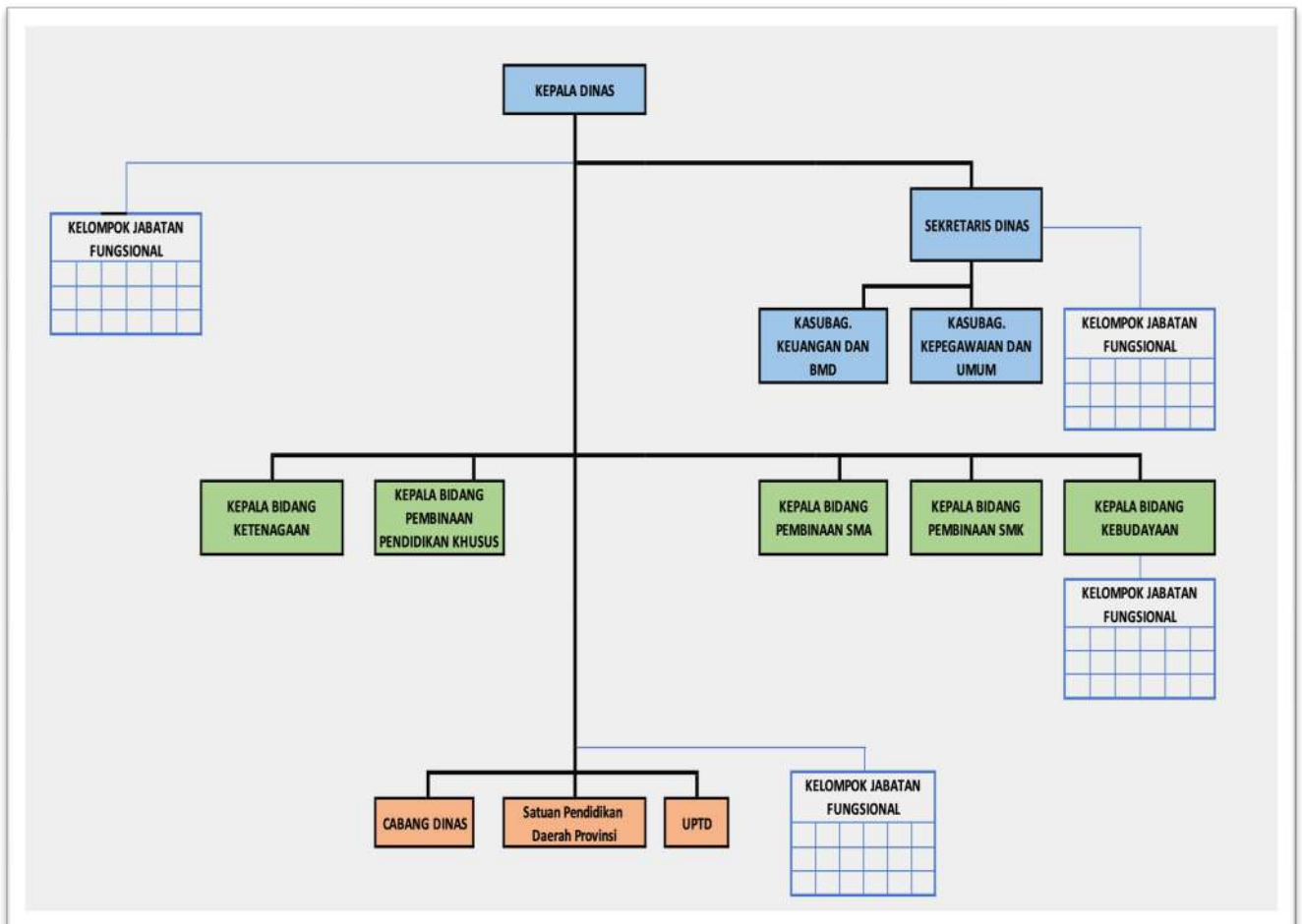
1.3 SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri Atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- 3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- 4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
- 5) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
- 6) Bidang Pembinaan Ketenagaan
- 7) Bidang Kebudayaan, terdiri atas;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi cagar Budaya dan Permuseuman
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sejarah dan Tradisi

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kesenian
- 8) Cabang Dinas
- 9) Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 10) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, dan
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku



1.4. SUMBER DAYA

a. Sumber daya Manusia

Berdasarkan Bezetting Pegawai (PNS dan PPPK) Keadaan Desember 2025, jumlah PNS dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebanyak 7.061 orang yang terdiri dari:

1. Golongan

Tabel 1
Data Pegawai berdasarkan Gol. Ruang

Jumlah Pegawai	Pangkat Golongan Ruang																
	IV /e	IV /d	IV /c	IV /b	IV /a	III/d	III/c	III/b	III/a	II /d	II /c	II /b	II /a	I /d	I /c	I /b	I /a
7.061	-	-	109	580	905	1.323	810	371	2.654	96	93	80	30	6	2	2	-
	1.594					5.158				299				10			

2. Tingkat Pendidikan

Tabel 2
Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									
	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/Sed	SMP/Sed	SD/Sed
7.061		281	6.341	16	59	13	1	337	7	6

3. Agama dan Jenis Kelamin

Tabel 3
Data Pegawai berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai	Agama							Jenis Kelamin	
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Lainnya	L	P
7.061	2.971	3.596	485	8	-	-	1	2.440	4.621
	7.061							7.061	

b. Aset Tetap

Guna Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi Maluku ditunjang dengan sarana prasarana/aset tetap yang sampai dengan 31 Desember 2025 senilai **Rp. 686.017.765.952,54,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Data Nilai Asset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
per 31 Desember 2025

NO	NAMA ASET	NILAI (Rp)
1	Tanah	Rp. 29.265.457.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 306.455.993.182,06
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 512.500.420.534,62
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 20.856.604.114,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 14.316.503.906,70
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 343.522.150,00
Akumulasi Penyusutan		-Rp. 197.720.734.934,84
Total Nilai Aset		Rp. 686.017.765.952,54

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pihak yang membutuhkan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

1.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Maluku serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan pelayanan dimaksud, dan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta memperhatikan telaahan renstra kemendikbud 2025-2026 dan Telaahan tata ruang wilayah, maka penentuan isu strategis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilakukan dengan mereviu berbagai telaah yang di tinjau dari aspek aspek sebagai berikut :

1. Gambaran Pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan daerah terjadi trend peningkatan capaian kinerja layanan dimana target capaian setiap indicator 2014-2018 berdasarkan standar IKK dan SPM justru melebihi target yang di tetapkan. Tetapi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah tersebut justru banyak indikator yang masuk dalam progam Pendidikan Dasar sehingga setelah peralihan kewenangan dengan di keluarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memiliki kewenangan urusan manajemen Pendidikan menengah dan khusus sedangkan Pendidikan dasar menjadi kewenangan Kabupaten/Kota justru terjadi perubahan focus pelayanan. Dari sisi anggaran juga mengalami trend menurun dimana trend anggaran justru pada awal tahun renstra mengalami peningkatan daya serap yaitu 99.81% dan pada akhir tahun 2018 terjadi trend menurun dengan daya serap yaitu 91.01%.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kemendikbud 2025-2026

Jika di tinjau dari Aspek Sasaran jangka menengah daerah pada Renstra Kemendikbud 2025-2026 maka revitalisasi Pendidikan vokasi yang mengarah pada pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing, perilaku positif siswa, peran pelaku budaya, peningkatan angka partisipasi penduduk usia sekolah, mutu layanan dan lulusan justru sejalan dengan kebutuhan pengembangan Pendidikan di Maluku saat ini karena revitalisasi Pendidikan vokasi akan meningkatkan lulusan SMK yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan dunia industry serta pola perilaku siswa yang cenderung negative sebagai dampak revolusi digital serta angka partisipasi penduduk

usia sekolah yang menurun pada SMA/SMK dan Pendidikan Khusus jika didasarkan pada SPM Pendidikan Menengah dan khusus. Selain itu peningkatan mutu layanan dan lulusan melalui berbagai program peningkatan mutu pendidik dan kualitas peserta didik juga menjadi factor pendorong dalam pengembangan Pendidikan ke depan dengan tetap memperhatikan factor penghambat sebagaimana telah di jelaskan dalam telaahan Renstra Kemendikbud 2025-2026.

Berdasarkan aspek dimaksud dengan mempertimbangkan masalah pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maka perlu di tentukan isu strategis sebagai upaya peningkatan kebijakan yang tepat sasaran serta memiliki daya ungkit dan berdampak ke depan terhadap masyarakat dan para pelaku Pendidikan dan Kebudayaan dengan identifikasi isu strategisnya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus yang berkualitas dan merata;
2. Rendahnya daya saing dan relevansi Pendidikan Vokasi;
3. Belum optimalnya Pelayanan dan pelestarian Budaya yang berkualitas;
4. Belum optimalnya sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah serta. manajemen pendukung tugas pembantuan urusan Pendidikan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan penilaian hasil isu strategis baik pada nilai skla kriteria dan rata-rata skor maka penentuan isu Strategis yang akan berpengaruh ke depan terhadap pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing dan relevansi Pendidikan Vokasi;
2. Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus yang

berkualitas dan merata;

3. Belum Optimalnya Pelayanan dan pelestarian Budaya yang berkualitas;
4. Belum optimalnya sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan.

Perencanaan Kinerja

Bab II

2.1. RENCANA STRATEGIS

a. Visi

Pembangunan pendidikan dan Kebudayaan ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subjek, yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Fokus pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan ke depan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing SDM Indonesia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dan pembangunan ekonomi kreatif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun 2025 difokuskan pada aspek Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan, dan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan dengan memperhitungkan potensi,

peluang, tantangan dan permasalahan yang ada atau yang mungkin timbul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tersebut sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyusunan Rencana strategis pada bidang pendidikan dan Kebudayaan. LKIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan mengenai Visi di dasarkan pada visi Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Maluku 2025-2026 sebagai berikut :

Visi
<i>“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”</i>

Untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Maluku tersebut maka ditetapkan misi Pemerintah Provinsi Maluku yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Kode	Misi
M1	Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
M2	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
M5	Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

b. Tujuan

Bertolak dari visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Tujuan Strategis
T1	Meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing
T2	Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan
T3	Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang profesional karakteristik, dan berintegrasi.

Kode	Sasaran Strategis
S1	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan
S2	Meningkatnya partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat
S3	Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat
S4	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah alat ukur yang digunakan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan, sehingga terlihat indikasi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan, atau melaluinya dapat diperoleh Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik sehingga dapat dibandingkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Tujuan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sesuai Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025-2026 serta IKU 2025-2026 berdasarkan RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik dibagi Total Guru dan Tenaga Kependidikan dikali 100%	Bidang GTK	Data DAPODIK
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	$APS \text{ SMA Sederajat} = \frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMA, SMK dan PMPK	Data Dapodik dan Dukcapil
			Tingkat partisipasi penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	$APS (16-18 \text{ Tahun}) = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100$	Bidang Pembinaan SMA, SMK dan PMPK	Data Dapodik dan Dukcapil
3	Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan	Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Menghitung Dimensi Ketahanan Sosial Budaya : $D_1 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 S_{1,i} = \frac{S_{1,1} + S_{1,2} + S_{1,3} + S_{1,4} + S_{1,5} + S_{1,6} + S_{1,7} + S_{1,8}}{8}$ Menghitung Nilai S : $S_{1,i} = \frac{X_{1,i} - \min X_{1,i} }{\max X_{1,i} - \min X_{1,i} }, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdik.kem.go.id/

			Dimensi Warisan Budaya	Menghitung Dimensi Warisan Budaya: $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4,i} = \frac{S_{4,1} + S_{4,2} + S_{4,3} + S_{4,4} + S_{4,5} + S_{4,6}}{6}$ Menghitung Nilai S: $S_{4,i} = \frac{X_{4,i} - \min(X_{4,i})}{\max(X_{4,i}) - \min(X_{4,i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdikbud.go.id/
			Dimensi Ekspresi Budaya	Menghitung Dimensi Ekspresi Budaya: $D_3 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{3,i} = \frac{S_{3,1} + S_{3,2} + S_{3,3} + S_{3,4}}{4}$ Menghitung Nilai S: $S_{3,i} = \frac{X_{3,i} - \min(X_{3,i})}{\max(X_{3,i}) - \min(X_{3,i})}, i = 1, 2, 3, 4$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdikbud.go.id/
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerinta	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Tabel 6
Sasaran dan Indikator Kinerja Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja 2025
Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Rasio guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:20
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat	100%
	Tingkat Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	100%
Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	10
	Dimensi Warisan Budaya	28
	Dimensi Ekspresi Budaya	12
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	B

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Sebagai langkah penjabaran Renstra ke dalam target - target tahunan dan sebagai wahana yang menghubungkan dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam tahun tertentu, maka Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada RPD 2025-2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan wujud nyata untuk meningkatkan komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja (Murni)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:20
2	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	100%
		Tingkat partisipasi penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%
3	Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	10
		Dimensi Warisan Budaya	28
		Dimensi Ekspresi Budaya	12
4	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	B

Akuntabilitas Kinerja

Bab III

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melakukan atribusi penilaian dengan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Dimana penilaian dilakukan sesuai kriteria gradasi nilai, sebagai berikut :

Tabel 8
Gradasi Nilai Peringkat Kinerja

No	Bobot Nilai	Kategori Capaian
1	100	AA
2	90	A
3	80	BB
4	70	B
5	60	CC
6	50	C
7	30	D
8	0	E

Penggunaan skala nilai peringkat kerja ini untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan sasaran kinerja serta faktor-faktor penghambat sehingga dapat memacu peningkatan dan perbaikan kinerja organisasi ke depan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggunakan 4 (Empat) Sasaran Kinerja, maka Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dapat di uraikan secara detail sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan
------------------	---

Tabel 9
Capaian Sasaran Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:20	1:10	50%
Rata-rata capaian		50%		

Pada sasaran strategis 1 (Satu) yang bertujuan untuk meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan berdasarkan pada data Rasio ketersediaan guru terhadap murid pada Jenjang Pendidikan SMA dan SMK di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2025. Rata-rata capaian ketiga indikator adalah **50%** dengan Kategori Penilaian **C**. Untuk menggambarkan ukuran sasaran ini maka perlu di jabarkan melalui tabel perbandingan dengan pendekatan analisisnya sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
antara Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:9	45%	1:10	50%

Jika dilihat pada tabel 10 diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi rasio guru terhadap murid. Jika pada tahun 2024 rasio adalah 1:9 dengan capaian atas realisasi adalah 45% dimana 1 orang guru mengajar 9 siswa, maka pada tahun 2025 meningkat menjadi 1:10 dengan capaian atas target adalah 50% dimana 1 orang guru mengajar 10 siswa. Hal ini dapat terjadi diakibatkan terjadi peningkatan jumlah guru pada Jenjang SMA/SMK pada tahun 2025.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir periode RPD

Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:9	1:10	1:20

Rasio guru terhadap murid Pendidikan Menengah SMA/SMK pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024. Realisasi 2024 dan 2025 meskipun mengalami peningkatan, namun masih sangat jauh dari rasio ideal yang diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yakni 1:20 dimana 1 orang guru hanya mengajar 20 siswa. Rasio ideal ini diharapkan dapat terlaksana pada akhir tahun 2026 sehingga proses belajar mengajar siswa di dalam kelas dapat lebih efektif dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan memengaruhi kualitas lulusan SMA/SMK di Provinsi Maluku.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam perspektif analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan, maka untuk tahun 2025 rata-rata capaian terhadap kinerja Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan sangat memuaskan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Analisis keberhasilan untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah pada tahun 2025 di targetkan 1:20 dimana rata rata 1 guru menghadapi 20 orang murid. Realisasi terhadap target adalah 1:10 atau rata-rata 1 guru menghadapi 10 murid dengan capaian antara realisasi di bandingkan target adalah 50%. Terjadi peningkatan dari tahun 2024. Jika dilihat dari kuantitas realisasi yang dihasilkan mengalami peningkatan, namun perlu diingat kembali bahwa ini merupakan hasil perbandingan rasio guru terhadap murid secara umum bukan dalam hal spesifik seperti rasio terkait mata Pelajaran di sekolah sesuai Analisa kebutuhan guru. Jika dilihat dari segi kualitas maka jumlah guru yang ada di 11 Kab/kota melebihi ideal kebutuhan guru yang dibutuhkan sehingga membutuhkan adanya Analisa kebutuhan guru per Mapel yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan guru per Sekolah per Kabupaten/Kota sehingga rasio yang didapatkan ideal yakni 1:20. Guna mendapatkan Rasio yang ideal per Mapel maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku saat ini sedang mendata kebutuhan guru di 11 Kab/Kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah guru Jenjang SMA/SMK pada tahun 2025 sebesar 9.219 orang dengan total siswa SMA/SMK sebesar 88.439 siswa. Sehingga jika dihitung peningkatan ini juga dikarenakan meningkatnya jumlah murid dan guru SMA/SMK pada tahun 2025. Dengan realisasi yang ada, maka indikator ini dinyatakan berhasil. Keberhasilan ini merupakan Upaya dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang berhasil dalam memenuhi kebutuhan guru di Provinsi Maluku khususnya pada Jenjang SMA dan SMK. Diharapkan kedepan adanya Solusi serta regulasi dan kebijakan-kebijakan untuk

meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah terutama Jenjang SMP/ sederajat untuk dapat melanjutkan ke Jenjang lebih tinggi serta menekan ATK dan APS di Provinsi Maluku. Sebaran rasio guru per siswa dapat di lihat pada tabel 12 berikut ini :

Tabel 12
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Provinsi
Maluku Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru SMA/SMK 2025					Jumlah Murid SMA/SMK 2025					Rasio		
		SMA		SMK		Total	SMA		SMK		Total			
		L	P	L	P		L	P	L	P				
1	Kab Maluku Tengah	438	1299	87	192	2,016	7,961	7,600	1,062	708	17,331	1	:	9
2	Kota Ambon	235	852	221	468	1,776	7323	7059	3,207	2,887	20,476	1	:	12
3	Kab Seram Bagian Barat	308	583	94	233	1,218	4213	4124	776	597	9,710	1	:	8
4	Kab Kepulauan Tanimbar	170	317	86	133	706	2335	2647	893	539	6,414	1	:	9
5	Kab Buru	144	251	101	152	648	2434	2446	1,091	963	6,934	1	:	11
6	Kab Seram Bagian Timur	129	216	58	90	493	2026	2144	590	538	5,298	1	:	11
7	Kab Kepulauan Aru	93	182	36	98	409	1543	1650	831	655	4,679	1	:	11
8	Kab Maluku Tenggara	104	258	80	116	558	1737	1534	1,083	757	5,111	1	:	9
9	Kab Maluku Barat Daya	129	253	53	100	535	1856	1873	505	513	4,747	1	:	9
10	Kab Buru Selatan	88	159	67	91	405	1238	1214	591	517	3,560	1	:	9
11	Kota Tual	81	169	36	66	352	1537	1571	499	572	4,179	1	:	12
Total		1,919	4,539	919	1,739	9,116	34,203	33,862	11,128	9,246	88,439	1	:	10

b. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan di kelola oleh 1 bidang teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu Bidang Pembinaan Ketenagaan dengan jumlah aparatur pada tahun 2025 adalah 20 orang. Untuk 20 ASN yang berada pada Bidang Pembinaan Ketenagaan sudah sangat efisien dengan pembagian tugas yang dibagikan sesuai jabatan serta tupoksi masing-masing. Aparatur yang ada tetap fokus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

c. Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indikator sasaran ini ditunjang oleh 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang di tetapkan pada Tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Murni) (Rp)	Anggaran (Perubahan) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	10.002.024.900,-	7.314.093.387,-	3.571.968.792,-
2	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	27.713.836.800,-	21.793.588.817,-	16,340,591,671

Pada tabel diatas, program yang menunjang sasaran ini adalah 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Upaya kedepan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah dengan meningkatkan Pembangunan sarpras serta peningkatan

kualitas Pendidik dan peserta didik pada Pendidikan Menengah SMA dan SMK serta pemerataan pendistribusian guru, sehingga rasio guru terhadap murid dapat mencapai target, baik secara kuantitas dan juga kualitas yakni dengan pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi serta pelatihan guna peningkatan kapasitas guru.

SASARAN 2**Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat**

Tabel 14

Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat	100%	71.63%	71.63
2	Tingkat Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	100%	71.34%	71.34
Rata-rata Capaian		71.49%		

Pada sasaran strategis 2 (dua) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang Pendidikan menengah dalam perhitungan APS baik secara umum (SMA, SMK dan SLB) maupun berdasarkan pada usia 16-18 tahun pada Jenjang Pendidikan SMA dan SMK melalui upaya perluasan akses Pendidikan menengah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terus berupaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah serta menekan angka disparitas APK antara penduduk termiskin dan penduduk terkaya. Pada sasaran 2 ini terdapat 2 indikator dimana rata-rata capaian realisasi terhadap target pada tahun 2025 sebesar

71.49% dengan kategori penilaian **B**. Untuk menggambarkan ukuran sasaran ini maka perlu di jabarkan dengan tabel perbandingan dan pendekatan analisisnya sebagai berikut :

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat	71.10	71.10%	71.63%	71.63%
2	Tingkat Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	70.41	70.41%	71.34%	71.34%

Pada Tabel 15, jika dilihat pada capaian antara tahun 2024 dn 2025, maka pada tahun 2025 APS Menengah Sederajat mengalami peningkatan sebesar 0.53%. Sementara pada capaian indikator Tingkat Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 0.93% jika dibandingkan capaian indikator tahun 2024.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat	71.10	71.63%	100%
2	Tingkat Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	70.41	71.34%	100%

Pada tabel 16, peningkatan capaian 2025 dari capaian target tahun 2024 terjadi dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah peserta didik Jenjang SMA, SMK dan SLB pada tahun 2025, sehingga diharapkan pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dapat mengalami peningkatan bahkan mencapai target yang telah ditentukan.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam perspektif analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, maka untuk tahun 2025 rata-rata capaian terhadap kinerja Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat dengan 2 indikator kinerja secara rata-rata cukup berhasil dan mendekati target yang ditetapkan. Analisis keberhasilan untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2025 ditargetkan 100% dengan realisasi atas target yaitu 71.63%. Maka, capaian kinerja realisasi terhadap target adalah 71.63%. Jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2024 sebesar 71.10%, maka tahun 2025 indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat mengalami peningkatan sebesar 0.53%. Meskipun mengalami peningkatan, berdasarkan data Dapodik Kemendikdasmen Tahun 2025 semester 2025/2026 ganjil (Semester 1) jumlah Murid SMA, SMK dan SLB yang ada pada 300 SMA, 124 SMK dan 16 SLB di Provinsi Maluku mengalami penurunan sebesar 366 orang. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

dilakukan melalui kebijakan perluasan akses partisipasi pendidikan bagi penduduk usia 16 – 18 tahun pada jenjang SMA/SMK serta Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun yang ada di Provinsi Maluku dengan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana, pemberian beasiswa bagi peserta Didik, penyelenggaraan lomba-lomba baik O2SN, FLS2N, LKSN, OSN dll baik yang menggunakan APBD seperti DAU regular dan DAU Earmark, maupun APBN baik Fisik (DAK Fisik : penyediaan Peralatan IPA dan TIK pada SMA serta pengadaan peralatan Praktek Kejuruan dan Peralatan TIK bagi SMK), Non Fisik (Dana BOSP Reguler kepada seluruh sekolah dan BOSP Kinerja bagi sekolah berprestasi dan berkinerja terbaik) serta PIP (Program Indonesia Pintar : bantuan tunai Pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada siswa miskin/rentan miskin, pemegang KIP atau terdaftar Dapodik dengan tujuan adar siswa tidak putus sekolah dan tetap mendapatkan pendidikan), sehingga diharapkan kedepan dapat menurunkan jumlah Anak Putus Sekolah di Provinsi Maluku serta meningkatkan kualitas bukan hanya kuantitas Pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran (guru) serta kualitas peserta didik yang kedepan diharapkan mampu bersaing dengan lulusan SMA, SMK dan SLB baik secara Nasional maupun global. Sehingga, kami sangat mengharapkan adanya dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat serta pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam upaya peningkatan serta perluasan akases Pendidikan di Maluku. indikator Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini :

Tabel 17
Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2025
Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun		Penduduk Disabilitas Usia 4-18 tahun	Total	Jumlah Murid SMA/SMK 2025								APS
						SMA		SMK		SLB		Total		
		L	P			L	P	L	P					
1	Kab Maluku Tengah	13,987	13,069	149	27,205	7,961	7,600	1,062	708	68	45	17,444	64.12	
2	Kota Ambon	11,071	10,109	205	21,385	7,323	7,059	3,207	2,887	236	125	20,837	97.44	
3	Kab Seram Bagian Barat	7,661	7,087	-	14,748	4,213	4,124	776	597	50	37	9,797	66.43	
4	Kab Kepulauan Tanimbar	4,744	4,498	78	9,320	2,335	2,647	893	539	35	22	6,471	69.43	
5	Kab Buru	4,781	4,340	48	9,169	2,434	2,446	1,091	963	40	22	6,996	76.30	
6	Kab Seram Bagian Timur	5,149	4,835	23	10,007	2,026	2,144	590	538	0	0	5,298	52.94	
7	Kab Kepulauan Aru	3,846	3,517	22	7,385	1,543	1,650	831	655	23	19	4,721	63.93	
8	Kab Maluku Tenggara	4,128	3,875	51	8,054	1,737	1,534	1,083	757	56	38	5,205	64.63	
9	Kab Maluku Barat Daya	3,042	2,947	83	6,072	1,856	1,873	505	513	0	0	4,747	78.18	
10	Kab Buru Selatan	3,008	2,718	20	5,746	1,238	1,214	591	517	16	16	3,592	62.51	
11	Kota Tual	2,842	2,706	35	5,583	1,537	1,571	499	572	14	8	4,201	75.25	
Total		64,259	59,701	714	124,674	34,203	33,862	11,128	9,246	9,246	9,246	89,309	71.63	

- 2) Untuk indikator Tingkat Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pada tahun 2025 ditargetkan 100% dengan realisasi atas target yaitu 71.34%. Maka, capaian kinerja realisasi terhadap target adalah 71,34%. Jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2024 sebesar 70.41%, maka tahun 2025 indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat mengalami peningkatan sebesar 0.93%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan jumlah murid SMA/SMK pada tahun 2025. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam rangka menindaklanjuti Permendikbud 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilakukan melalui kebijakan perluasan akses partisipasi pendidikan bagi penduduk usia 16 – 18 tahun pada jenjang SMA/SMK yang ada di Provinsi Maluku dengan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana, pemberian beasiswa bagi peserta Didik, penyelenggaraan lomba-lomba baik O2SN, FLS2N, LKSN, OSN dll baik yang menggunakan APBD seperti DAU regular dan DAU Earmark, maupun APBN baik Fisik (DAK Fisik : penyediaan Peralatan IPA dan TIK pada SMA serta pengadaan peralatan Praktek

Kejuruan dan Peralatan TIK bagi SMK), Non Fisik (Dana BOSP Reguler kepada seluruh sekolah dan BOSP Kinerja bagi sekolah berprestasi dan berkinerja terbaik) serta PIP (Program Indonesia Pintar : bantuan tunai Pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada siswa miskin/rentan miskin, pemegang KIP atau terdaftar Dapodik dengan tujuan agar siswa tidak putus sekolah dan tetap mendapatkan pendidikan), sehingga diharapkan kedepan dapat menurunkan jumlah Anak Putus Sekolah di Provinsi Maluku serta meningkatkan kualitas bukan hanya kuantitas Pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran (guru) serta kualitas peserta didik yang kedepan diharapkan mampu bersaing dengan lulusan SMA/SMK baik secara Nasional maupun global. Sehingga, kami sangat mengharapkan adanya dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat serta pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam upaya peningkatan serta perluasan akses Pendidikan di Maluku. indikator Angka Partisipasi Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini :

Tabel 18
Tingkat Partisipasi Penduduk Usia 16-18 tahun yang
berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun			Jumlah Murid SMA/SMK 2025					APS
					SMA		SMK		Total	
		L	P	Total	L	P	L	P		
1	Kab Maluku Tengah	13,987	13,069	27,056	7,961	7,600	1,062	708	17,331	64.06
2	Kota Ambon	11,071	10,109	21,180	7,323	7,059	3,207	2,887	20,476	96.68
3	Kab Seram Bagian Barat	7,661	7,087	14,748	4,213	4,124	776	597	9,710	65.84
4	Kab Kepulauan Tanimbar	4,744	4,498	9,242	2,335	2,647	893	539	6,414	69.40
5	Kab Buru	4,781	4,340	9,121	2,434	2,446	1,091	963	6,934	76.02
6	Kab Seram Bagian Timur	5,149	4,835	9,984	2,026	2,144	590	538	5,298	53.06
7	Kab Kepulauan Aru	3,846	3,517	7,363	1,543	1,650	831	655	4,679	63.55
8	Kab Maluku Tenggara	4,128	3,875	8,003	1,737	1,534	1,083	757	5,111	63.86
9	Kab Maluku Barat Daya	3,042	2,947	5,989	1,856	1,873	505	513	4,747	79.26
10	Kab Buru Selatan	3,008	2,718	5,726	1,238	1,214	591	517	3,560	62.17
11	Kota Tual	2,842	2,706	5,548	1,537	1,571	499	572	4,179	75.32
Total		64,259	59,701	123,960	34,203	33,862	11,128	9,246	88,439	71.34

a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di kelola oleh 3 (tiga) bidang teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu Bidang Pembinaan SMA dengan jumlah ASN sebanyak 14 Orang, Bidang Pembinaan SMK sebanyak 11 orang dan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sebanyak 11 orang. Jika dilihat dari Anjab dan ABK, maka jumlah ASN pada ketiga Bidang ini sudah sangat efektif dengan tupoksi masing-masing yang sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan meskipun ada beberapa yang belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa masalah. Diharapkan kedepan adanya pemberian pelatihan pegawai dalam hal IT guna mendukung laju perkembangan Pendidikan saat ini serta pemberian bahan dan alat dukung kerja guna mendukung kinerja ASN. Aparatur yang ada tetap fokus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah di tetapkan. Efisiensi sumber daya manusia dengan jumlah personil yang tersedia dengan distribusi fungsi yang jelas terhadap aparatur yang menangani program dan kegiatan, dapat berdampak terhadap capaian sasaran strategis ini.

d. Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indicator yang di tetapkan pada Tabel 19 sebagai berikut :

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Meningkatkan akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Pengelolaan Pendidikan				
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2,775,350,000	3,428,573,815	1,983,610,755
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	183,798,395	176,248,395
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10,244,380,000	12,505,092,677	6,210,957,107
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,017,500,000	5,166,290,000	3,967,719,302
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	885,000,000	1,097,282,100	838,547,305
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	409,215,675	396,165,675
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5,558,246,000	9,548,246,000	4,025,703,889
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	19,517,444,487	20,492,071,447	8,882,069,619
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2,634,141,836	1,599,274,992	1,444,329,792
10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3,512,222,500	244,564,500	20,000,000
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1,582,718,400	725,968,400	20,000,000
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	137,939,150,000	137,939,150,000	137,939,150,000
13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,951,248,700	843,037,000	338,248,300
14	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,788,750,000	6,027,432,688	4,619,945,302
15	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	1,379,352,250	1,359,744,966

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	355,000,000	1,016,661,700	545,656,340
17	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6,291,422,030	8,245,845,480	4,432,464,535
18	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	493,923,510	452,294,581
II Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
1	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	-	1,148,873,415	221,483,500
2	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	2,510,075,999	2,470,359,576
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	254,757,806	250,007,806
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	24,553,178	24,553,178
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7,501,000,000	9,035,307,167	5,528,543,295
6	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	420,000,000	420,000,000	211,771,500
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	34,036,000,000	40,575,809,000	25,970,211,806
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5,463,258,180	4,965,060,180	4,858,642,180
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2,107,021,500	1,258,796,900	493,821,370
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	10,002,024,900	1,366,097,790	719,225,331
11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2,040,937,790	6,541,500,000	6,541,500,000
12	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6,541,500,000	3,039,097,000	1,058,149,260
13	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,425,250,000	5,606,917,258	3,347,178,517
14	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	4,673,500,000	1,575,000,000	1,150,848,000
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,575,000,000	18,670,548	18,670,548

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
16	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	-	413,176,308	233,544,527
II Program Pengelolaan Pendidikan				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus				
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	369,456,500	369,456,500	99,266,600
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	89,962,437	73,991,842
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	124,545,505	60,206,809
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6,275,201,840	7,088,474,560	2,875,241,046
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1,465,064,588	1,465,064,588	679,441,788
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	5,065,533,000	4,748,018,500	4,383,033,900
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2,517,920,000	1,454,740,000	1,450,420,000
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2,522,336,000	1,059,260,000	896,780,112
9	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1,926,142,400	3,065,532,731	1,863,233,403

Guna meningkatkan sasaran Meningkatnya akses layanan Pendidikan menengah dan khusus secara berkualitas dan merata maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku didung dengan 1 Program, 3 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sarpras, peningkatan kualitas peserta didik dengan memberikan bantuan bagi peserta didik serta peningkatan kelembagaan dan manajemen sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka putus sekolah dan menambah daya tampung sekolah sehingga daya serap siswa semakin banyak serta meningkatkan kreativitas peserta didik baik seni dan olahraga dengan FLS2N, O2SN, LKSN dan Fiksi. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD dan APBN.

SASARAN 3

Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat

Tabel 20

Capaian Sasaran Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat

Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	10	81.21	812.10
2	Dimensi Warisan Budaya	28	54.93	196.18
3	Dimensi Ekspresi Budaya	12	39.85	332.08
Rata-rata Capaian		446.79		

Sasaran Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas Budaya baik Cagar Budaya Benda maupun takbenda yang ada di Provinsi Maluku. Hal tersebut sejalan dengan Upaya peningkatan IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) dimana, ketiga Indikator kinerja yang ada pada sasaran ini merupakan Dimensi perhitungan IPK. Pada sasaran 3 ini terdapat 3 indikator dimana capaian realisasi terhadap target pada tahun 2025 adalah **446.79%**. Jika dilihat dari bobot nilai yang didapatkan, maka sasaran ini mendapatkan kategori penilaian **AA**. Ketercapaian sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan penjelasan analisisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	81.99	N/A	81.21	812.10
2	Dimensi Warisan Budaya	58.33	N/A	54.93	196.18
3	Dimensi Ekspresi Budaya	43.29	N/A	39.85	332.08

Berdasarkan data pada tabel 21 diatas, perlu diketahui bahwa pada tahun 2024 indikator ini tidak termuat Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2019-2024, sehingga tidak ada target dan capaian maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku hanya mencantumkan realisasi kinerjanya. Sementara jika dilihat pada tabel realisasi dan capaian tahun 2025 memiliki target pada indikator Dimensi Ketahanan Sosial Budaya yakni 81.21 dengan capaian sebesar 812.10%, target Dimensi Warisan Budaya 54.93 dengan capaian 196.18%, dan target Dimensi Ekspresi Budaya 39.95 dengan capaian sebesar 332.08%. Data ini merupakan data resmi yang tersedia pada Website Kementerian Kebudayaan RI : resmi <https://ipk.kemenbud.go.id/>.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir periode RPD

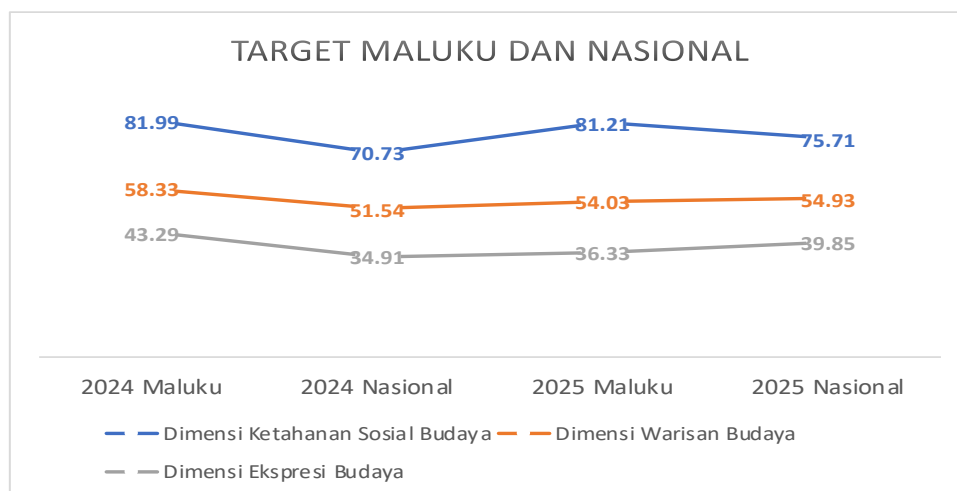
Indikator Kinerja				Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya			81.99	81.21	12
2	Dimensi Warisan Budaya			58.33	54.93	34
3	Dimensi Ekspresi Budaya			43.29	39.85	14

Realisasi kinerja pada tahun 2024 merupakan capaian yang didapatkan dari perhitungan IPK Provinsi Maluku. Ketiga indikator diatas merupakan indikator pembentuk yang didapatkan dari pengumpulan data setiap provinsi oleh Kemendikbudristek RI (saat ini Kementerian Kebudayaan RI) dan hasilnya akan disampaikan pada tahun N+1, sementara untuk capaian tahun 2025 lebih besar dari target dikarenakan pada proses perencanaan target yang ditetapkan pada Renstra 2025-2026 sangat kecil sehingga capaian realisasi terhadap target sangat tinggi. Jika dilihat pada realisasi dan capaian tahun 2024 dan 2025, maka target pada tahun 2026 dirasa terlalu kecil dan tidak sesuai jika dilihat pada trend kenaikan tahun sebelumnya.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative 42erson yang telah dilakukan

Pada analisis ketiga indikator belum dapat dianalisa dikarenakan sampai saat ini Nilai Dimensi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia adalah Nilai 2023 yang digunakan sebagai capaian 2024, sementara untuk nilai 2024 yang digunakan sebagai capaian tahun 2025 masih belum dirilis sampai dengan saat ini.

Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi Dimensi Tahun 2024 dan 2025



b. Analisis atas efisiensi Penggunaan SDM

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat di 43erson oleh 1 (satu) bidang teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yaitu Bidang Kebudayaan dengan jumlah aparatur yaitu sebanyak 12 orang. Aparatur yang ada kemudian diberikan tupoksi sesuai dengan Jabatan masing-masing untuk mengelola Kebudayaan yang ada di Provinsi Maluku. Jumlah ini sudah sangat efektif jika dilihat dari beban kerja yang ada pada Bidang Kebudayaan. Aparatur tetap 43erso pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Efisiensi sumber daya manusia dengan jumlah 43ersonal yang tersedia dengan distribusi fungsi yang jelas terhadap aparatur yang menangani program dan kegiatan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indikator yang ditetapkan pada Tabel 23 sebagai berikut :

Tabel 23

Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Program Pengembangan Kebudayaan			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2,525,604,000	918,789,500	420,660,720
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1,645,640,000	296,660,000	-
II	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	706,083,460	269,060,460	195,060,460
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	521,540,200	345,604,200	140,876,200
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2,511,452,856	769,546,400	719,546,400
III	Program Pembinaan Sejarah			
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	2,222,243,000	258,484,000	8,660,000
IV	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	457,000,000	1,151,832,600	455,994,379
	Penetapan Cagar Budaya	800,000,000	1,013,709,400	399,139,488

SASARAN 4

Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik

Tabel 24

Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP	B	N/A	N/A
Rata-rata Capaian		N/A		

Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik belum dapat diukur diakibatkan belum ada pemeriksaan APIP tahun 2025. Ketercapaian sasaran ini dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan penjelasan analisisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 25

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja		2024		2025	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Nilai SAKIP	B	100%	N/A	N/A

Berdasarkan pada tabel 25 diatas, indikator nilai SAKIP 2024 merupakan nilai yang dihasilkan dari evaluasi AKIP pada tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Berdasarkan pada evaluasi yang telah dilaksanakan, maka hasil

evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menunjukkan nilai **61,65** dengan predikat **B (Baik)**. Selanjutnya, evaluasi AKIP pada tahun 2025 akan dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku belum mencantumkan nilai pada realisasi dan capaian tahun 2025.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5
Tahun 2024 dan 2025 serta Tahun Akhir periode RENSTRA

Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP	B	N/A	B

Berdasarkan pada tabel 26 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 mendapatkan predikat B atas target yakni B dengan nilai 61,65. Realisasi atas target tahun 2025 belum dicantumkan dikarenakan belum dilaksanakan evaluasi AKIP pada tahun 2025. Sehingga, diharapkan pada pemeriksaan AKIP tahun 2025 dan 2026 mengalami peningkatan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Untuk mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik dapat dilihat dari dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program dan pelayanan public yang prima dengan mempertimbangkan

kualitas tata kelola organisasi yang bermutu. Hal ini dapat di analisis dalam indicator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ditargetkan B, realisasi N/A. Hal ini dikarenakan pemeriksaan SAKIP yang dilakukan oleh APIP Inspektorat baru dilakukan hingga tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025. Terkait hasil LHE tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 61,65 dengan predikat B serta capaian 100% atas target yang ditetapkan yaitu B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sudah baik. Namun demikian, masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai di level eselon 2. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan pada tahun 2024, antara lain :

1. Memformalkan Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA);
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK dan Laporan Kinerja) pada WEB perangkat daerah atau WEB Provinsi Maluku tepat waktu;
3. Menyusun pedoman terkait pengukuran dan analisis indikator kinerja;
4. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (Aplikasi);
5. Menyampaikn bukti dukung berupa Notulensi dan Dokumentasi bahwa Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
6. Pemantauan atas capaian laporan kinerja di lakukan setiap triwulan/ semester;

7. Membuat Matriks tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dari Evaluator APIP.

b. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam konteks analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) maka sasaran strategis ini di kelola oleh sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang berjumlah 35 orang pada Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset serta Kepegawaian dan Umum. Jumlah pegawai pada Bidang Perencanaan berjumlah 5 orang dalam melaksanakan tugas dinilai belum efektif jika dilihat dari beban kerja yang ada. Aparatur yang ada tetap focus pada pengelolaan program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran guna memenuhi capaian sasaran strategis yang telah di tetapkan.

c. Analis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan dari sasaran strategis ini maka terdapat program yang menunjang kinerja pencapaian setiap indicator yang di tetapkan pada Tabel 27 sebagai berikut :

Tabel 27

Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	871,805,000	852,427,999	709,546,340
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	128,860,000	125,260,000	114,219,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	176,637,000	176,637,000	122,050,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	774,527,000	770,927,000	698,463,326

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,084,903,000	1,084,903,000	1,063,289,454
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,079,284,000	1,295,134,000	1,092,147,732
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	760,276,000	760,276,000	361,147,200
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	367,800,000	367,800,000	232,355,808
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	610,439,200	610,439,200	441,739,008
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	710,800,000	610,047,000	415,449,936
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700,000,000	406,509,500	77,241,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3,612,496,657	1,812,364,201	917,442,380
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	79,708,500	57,130,000	53,614,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,278,220,400	1,073,265,203	698,720,946
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,533,369,000	1,145,632,770	995,704,288
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600,000,000	600,000,000	100,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000	346,630,000	232,560,000
	Pengadaan Mebel	421,785,000	748,268,254	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,968,426,636	2,517,322,050	166,818,500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66,520,000	49,235,000	18,935,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,214,896,000	894,049,197	484,728,085

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,425,166,668	5,627,378,118	3,576,434,292
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,015,305,850	761,100,779	351,843,900
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183,588,782	96,236,200	95,336,200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6,115,576,000	4,689,545,600	2,343,832,000

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Upaya meningkatkan sasaran “Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik” berjumlah 1 Program, 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan anggaran yang bersumber pada DPA OPD tahun 2025.

8. REALISASI ANGGARAN

Analisis Realisasi Keuangan kami sajikan untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap data keuangan yang disajikan sehingga dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari segi Anggaran maka pada tahun 2025 TOTAL PAGU pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar **Rp.1,153,817,718,222,-** yang terbagi atas **Belanja Operasional** sebesar **Rp.1,032,549,475,838,-** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp.121,268,242,387,-** dengan daya serap anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku per 31 Desember 2025 mencapai **90.07%** dengan total realisasi sebesar **Rp.1,039,227,095,636,-** yang

terdiri dari **Belanja Operasional** sebesar **Rp.961,791,644,578,-** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp.77,435,451,058,-**.

Penutup

Bab IV

4.1. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Periode Januari s/d Desember 2025 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Pelaporan LKIP ini merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan seperti telah dijelaskan sebelumnya terdapat banyak kendala dan tantangan, baik disebabkan oleh karena perencanaan yang kurang efektif dan efisien, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi, belum meratanya distribusi guru termasuk faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya target capaian kinerja pada setiap sasaran, dan apabila dihubungkan dengan target capaian kinerja berdasarkan Renstra Transisi Tahun 2025-2026. Target sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada periode Rencana Strategis Transisi akan menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan dan kebudayaan kedepannya.

4.2. Tinjauan Khusus

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pencapaian sasaran seperti diuraikan dalam BAB sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 **Tingkat Capaian Kinerja** yang dapat dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar **142.07%** dengan Daya Serap Anggaran sebesar **90.09%**. Dari sisi kinerja mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2024 sebesar **52.04%**. Sedangkan Daya Serap

Anggaran mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar - **17.34%**. Adapun hasil yang dicapai merupakan hasil dari usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan mengimplementasikan program dan kegiatan dengan baik. Diharapkan kedepannya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan semakin baik dan meningkat.

Dengan berbagai usaha yang diupayakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024, capaian kerja yang dicapai berdasarkan Penilaian dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 dari 6 Sasaran Kinerja mendapatkan kategori penilaian **AA**. Tingkat capaian kinerja ini adalah hasil perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan yang didasarkan pada program kegiatan yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2025. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius untuk tahun anggaran berikutnya. Perhatian serius pula harus dilakukan pada sasaran-sasaran yang belum dilaksanakan dari rencanas strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Transisi Dinas Dikbud 2025-2026. Adapun kami sampaikan data kategori penilaian 4 sasaran yang telah dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada tabel dibawah ini :

Tabel 28
Capaian Penilaian Kinerja Tahun 2025

No	Bobot Nilai	Sasaran Kinerja	Kategori Capaian
1	50%	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	C
2	71.49%	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	B
3	446.79%	Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat	AA
4	--%	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas	--

		melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	
--	--	---	--

Pada tabel 29 diatas terlihat bahwa Dinas Pendidikan mendapatkan beberapa kategori pada 4 sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, antara lain : 2 C, dan 1 B (data Sementara).

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Agar semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Transisi 2025-2026 dapat dicapai secara maksimal maka tentu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh setiap sasaran yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan atau pun yang belum tercapai secara maksimal. Seperti telah diuraikan sebelumnya yang merupakan faktor yang turut mempengaruhi pencapaian target adalah perencanaan yang kurang efektif dan efisien, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi, belum meratanya distribusi guru, masih rendahnya Angka Partisipasi sekolah dimana masih ada Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah, Letak Geografis, kualitas dan kualifikasi guru, maka yang menjadi saran kami kiranya pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan hendaknya benar-benar menjadi skala prioritas mulai dari perencanaan bahkan sampai pelaksanaan dan realisasi anggaran serta perlu membuat peta distribusi guru, peningkatan kualitas dan kualifikasi guru melalui pelatihan/bimtek serta peningkatan bantuan siswa miskin.

Disamping itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku akan berupaya senantiasa mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi dan misi terselenggaranya layanan prima khususnya pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Maluku dapat terealisasi dengan baik.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025, yang merupakan bahan evaluasi sekaligus sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sesuai tugas dan fungsinya.

Ambon, Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku,



Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I – IV.b
NIP. 19760926 200312 2 006

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU**

TAHUN ANGGARAN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Nandar Joisangadji, S.Pt. M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

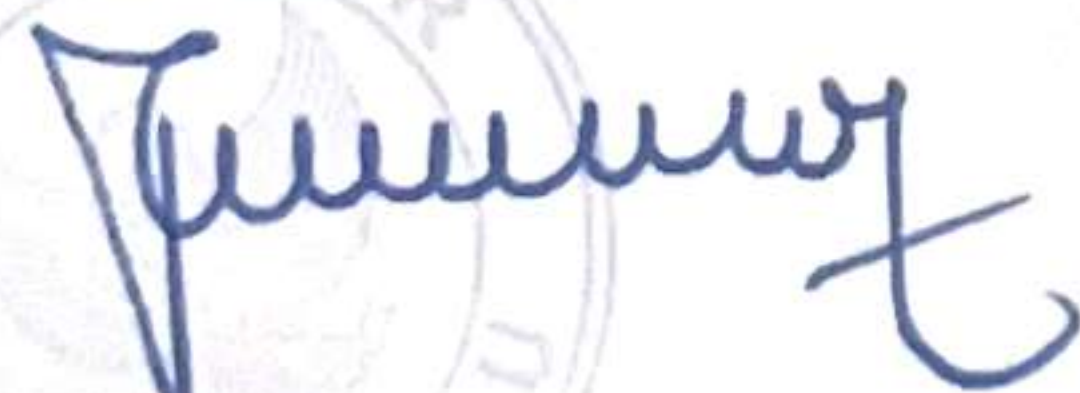
Nama : Hendrik Lewerissa
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2025 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2025

Pihak Kedua,


Hendrik Lewerissa
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,


Syamsul Nandar Joisangadji, S.Pt., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197011141998031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:20
2	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	100%
		Tingkat partisipasi penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%
3	Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	10
		Dimensi Warisan Budaya	28
		Dimensi Ekspresi Budaya	12
4	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 33,805,390,693	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 296,069,720,651	APBD
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 27,713,836,800	APBD
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 4,171,244,000	APBD
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 3,739,076,516	APBD
6	Program Pembinaan Sejarah	Rp 2,222,243,000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 7,900,076,340	APBD

Gubernur Maluku,



Hendrik Lewerissa

Ambon, Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku,



Syamsul Nandar Soisangadji, S.Pt., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197011141998031007



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 800 / 816

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja, maka perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) guna menjadi dasar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja;
7. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk :
1. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 2. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 3. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan;
 4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 06 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku



Syamsul Wandar Joisangadji, S.Pt. M.Si
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP. 19701114 199803 1 007

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala Bappeda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Inspektur Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku di Ambon;
6. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Nomor : 800/816

Tanggal : 06 Februari 2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik dibagi Total Guru dan Tenaga Kependidikan dikali 100%	Bidang GTK	Data DAPODIK
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berdaya saing	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	$APS \text{ SMA Sederajat} = \frac{\text{Jumlah Siswa Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMA, SMK dan PMPK	Data Dapodik dan Dukcapil
			Tingkat partisipasi penduduk Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	$APS (16-18 \text{ Tahun}) = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Thn}} \times 100$	Bidang Pembinaan SMA, SMK dan PMPK	Data Dapodik dan Dukcapil
3	Mewujudkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan	Mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	Menghitung Dimensi Ketahanan Sosial Budaya : $D_1 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 S_{1,i} = \frac{S_{1,1} + S_{1,2} + S_{1,3} + S_{1,4} + S_{1,5} + S_{1,6} + S_{1,7} + S_{1,8}}{8}$ Menghitung Nilai S : $S_{1,i} = \frac{X_{1,i} - \min(X_{1,i})}{\max(X_{1,i}) - \min(X_{1,i})}, i = 1,2,3,4,5,6,7,8$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdik.kem.go.id/

			Dimensi Warisan Budaya	Menghitung Dimensi Warisan Budaya: $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4,i} = \frac{S_{4,1} + S_{4,2} + S_{4,3} + S_{4,4} + S_{4,5} + S_{4,6}}{6}$ Menghitung Nilai S: $S_{4,i} = \frac{X_{4,i} - \min(X_{4,i})}{\max(X_{4,i}) - \min(X_{4,i})}, i=1,2,3,4,5,6$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdikbud.go.id/
			Dimensi Ekspresi Budaya	Menghitung Dimensi Ekspresi Budaya: $D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5,i} = \frac{S_{5,1} + S_{5,2} + S_{5,3} + S_{5,4}}{4}$ Menghitung Nilai S: $S_{5,i} = \frac{X_{5,i} - \min(X_{5,i})}{\max(X_{5,i}) - \min(X_{5,i})}, i=1,2,3,4$	Bidang Kebudayaan	https://ipk.kemdikbud.go.id/
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,



Syamsul Nandar Joisangadji, S.Pt. M.Si
 Pembina Tingkat I/IV-b
 NIP. 19701114 199803 1 007